



EDISI KAMIS, 4 JUNI 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI

Pemetaan Lahan Flyover Gedangan Dikebut

Pemkab Target Tuntas Enam Bulan

GEDANGAN-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memprioritaskan proses pemetaan dan pendataan seluruh objek tanah yang terdampak pembangunan Flyover Gedangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat proses pembebasan lahan sebelum proyek strategis itu memasuki tahap konstruksi.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, proses pendataan telah berjalan dan melibatkan pemerintah kecamatan serta pemerintah desa di wilayah terdampak. Pendataan dilakukan secara menyeluruh menggunakan pemetaan tidak ada pemolaan yang dapat menghambat pelaksanaan proyek di kemudian hari.



PADAT: Kemacetan rutin terjadi di Jalan Raya Gedangan.

Gerindra Dukung Perombakan Pimpinan BGN, Dimilai Perkuat Program MBG

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, H. Abdullah Nashih, mendukung perombakan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Nashih menilai perombakan tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal, efektif, dan tepat sasaran.

Nashih berharap, perombakan tersebut dapat meningkatkan kinerja BGN dalam memastikan MBG berjalan optimal. "Kami di Sidoarjo sangat mengapresiasi langkah Bapak Presiden Prabowo. Perombakan pimpinan BGN ini bukan sekadar pergantian organisasi, tetapi menunjukkan komitmen untuk menyanggah hal-hal yang tidak diinginkan," kata Nashih.



KEKUA Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, H. Abdullah Nashih, mendukung perombakan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Bupati Minta Baznas Sidoarjo Segera Perbaiki Rumah Empat Warga Desa Pabean Sedati

Sidoarjo, Memorandum. Sudah cukup lama Sujiono, Soleh, serta Dayat dan Rukiani tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH). Keempat merupakan warga Desa Pabean, Kecamatan Sedati.

Sujiono dan Soleh tinggal di Dusun Alur Tjip, sedangkan Dayat dan Rukiani tinggal di Dusun Payan. Dua rumah itu rusak Desa Pabean. Kondisi rumah keempat warga kurang rampung itu cukup mengganggu. Terlebih, saat ini musim penghujan, air hujan sering masuk ke rumah. Dayat dan Rukiani hanya tinggal menunggu waktu untuk pindah ke rumah baru.

Bupati Sidoarjo Subandi inspeksi mendadak (sidak) ke rumah empat warga Desa Pabean tersebut, Minggu (3/6). Satu per satu RTLH itu didokumentasikan. Bupati Sidoarjo dan Dinas Sosial Sidoarjo tidak ada, nanti rumah ini kita hadapkan ke Selatan," ujar bupati saat inspeksi mendadak.

Bupati berjanji memastikan rumah dapat segera dibangun setelah perbaikan dilakukan. Penghuni rumah harus dapat menggunakan perilaku hidup bersih dan sehat. Sekali selesai perbaikan rumah yang tidak layak huni, Bupati Sidoarjo berjanji akan segera membangun rumah yang layak huni bagi mereka.

Hasilnya, ia menandatangani surat pernyataan kepada empat rumah tersebut. "Nanti kalau sudah dibangun, ini harus dibuktikan, kalau rumah tidak layak huni, harus barang-barang yang rusak harus diganti. Kalau sudah selesai, harus ada laporan dari warga yang bersangkutan," kata Subandi.

Perbaikan yang sama juga diminta Bupati Sidoarjo pada rumah-rumah lain yang rusak. "Tapi masalah kebirokrasian, tembok-tembok putus semua, saya masuk kebelakang atap yang ada, jadi harus segera, kalau rumah yang rusak, harus ada laporan dari warga yang bersangkutan," kata Subandi.

Perbaikan yang sama juga diminta Bupati Sidoarjo pada rumah-rumah lain yang rusak. "Tapi masalah kebirokrasian, tembok-tembok putus semua, saya masuk kebelakang atap yang ada, jadi harus segera, kalau rumah yang rusak, harus ada laporan dari warga yang bersangkutan," kata Subandi.



Bupati Sidoarjo Subandi tidak rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Pabean, Kecamatan Sedati.



BEUM TUNTAS: Pipa pembangunan Lumut Sidoarjo terbangun langsung dengan kil Perorog. Foto kanan, korben Lumut Sidoarjo (dua dari kiri) didampingi Ketua BSN (dua dari kanan) berkunjung ke kantor retribusi Jawa Pas, Gela Pena Surabaya, kemarin (3/6).

Nilai Tanah Rp 40 Miliar Ditawar Rp 7 Miliar

Korban Lumpur Minta Ganti Rugi Segera Dillunas

SIDOARJO - Sudah 20 tahun bencana Lumpur Sidoarjo melanda Desa Ketapang dan sekitarnya. Namun hingga saat ini, masih ada ganti rugi yang belum dilunasi. Para korban lumpur meminta agar pemerintah segera mencairkan dana ganti rugi yang telah tersedia.

Salah satu korban lumpur, Astuti mengatakan bahwa keluarganya memiliki tanah seluas 40 hektar. Tanah tersebut sudah terdampas lumpur. "Kami sudah mengajukan permohonan ganti rugi ke pemerintah, tapi belum ada tanggapan," kata Astuti.

Salah satu korban lumpur, Astuti mengatakan bahwa keluarganya memiliki tanah seluas 40 hektar. Tanah tersebut sudah terdampas lumpur. "Kami sudah mengajukan permohonan ganti rugi ke pemerintah, tapi belum ada tanggapan," kata Astuti.

Sidoarjo

Asah Keterampilan Atlet Muda Melalui Lomba Berkuda

SIDOARJO - Sebanyak 30 siswa dari berbagai sekolah di Kabupaten Sidoarjo mengikuti lomba berkuda yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Lomba ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan keterampilan atlet muda di Kabupaten Sidoarjo.

Acara lomba berkuda digelar di Lapangan Olahraga Kecamatan Sidoarjo, Sabtu (3/6). Lomba ini diikuti oleh siswa-siswi dari berbagai sekolah di Kabupaten Sidoarjo. Lomba ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan keterampilan atlet muda di Kabupaten Sidoarjo.

35 Berkas Ganti Rugi Lumpur Lapindo Belum Tuntas

Sidoarjo - HARIAN BANGSA PT Minarak Lapindo Jaya mengupayakan proses penyelesaian ganti rugi terhadap warga terdampak lumpur Lapindo yang berada di dalam area perantara. 35 berkas yang belum terselesaikan.

Perusahaan pengembang tersebut telah melakukan upaya penyelesaian ganti rugi terhadap warga terdampak lumpur Lapindo yang berada di dalam area perantara. 35 berkas yang belum terselesaikan.

Prabowo Evaluasi Pimpinan BGN

Diapresiasi Gerindra Sidoarjo

Sidoarjo - HARIAN BANGSA Langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi dan perombakan kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat apresiasi dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal.

Ketua DPC Gerindra Sidoarjo H. Mimik Idayana mengatakan, keputusan tersebut menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk terus melakukan pembenahan demi keberhasilan program prioritas nasional.

"Kami di Sidoarjo sangat mengapresiasi ketegasan Bapak Presiden Prabowo. Perombakan pimpinan BGN ini bukan sekadar pergantian organisasi, tetapi bentuk nyata bahwa pemerintah serius melakukan pembenahan agar program MBG bisa berjalan maksimal," ujar Mimik dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Menurut Mimik, program MBG merupakan program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, tata kelola yang baik dan percepatan pelaksanaan menjadi hal yang sangat penting.

Ini menjadi pesan kuat bahwa pemerintah terus memantau jalannya program dan siap melakukan perbaikan kapan pun diperlukan. Tujuannya agar pelaksanaan di lapangan berjalan lancar dan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Wakil Bupati Sidoarjo tersebut menambahkan, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan. (md/rs)

187 SD-SMP Negeri Masih Dipimpin Plt Kepala Sekolah

Pemkab Siapkan Pengganti

Sidoarjo Netti Lastuning membutuhkan kepala sekolah yang belum memiliki kepegk definitif. Meski begitu, pemkab sudah menyiapkan calon kepala sekolah yang akan calon kepala sekolah SDN dan 15 SMPN yang masih dipimpin pelaksana tugas (plg) kepala. Pemkab berencana melakukan perkerutan untuk memenuhi kebutuhan kepala sekolah.

Netti Lastuning, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) mengatakan, saat ini sudah selesai, sampai di sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengajuan ke Kolah (KSPS) yang baru. Dia mengatakan, posisi plt tidak bisa digunakan dalam jangka panjang. Sebab, kepala sekolah definitif dibutuhkan untuk menjaga stabilitas manajemen dan pelaksanaan program sekolah. Kalau terulur lama dipimpin plt, manajemen sekolah tidak bisa berjalan maksimal.

Penanggung Jawab Pengawasan Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Cluditoro meminta Dinas Dikbud Sidoarjo segera menyiapkan perkerutan. Kekosongan kepala sekolah bisa berdampak pada lambatnya pengimbalan kejabatan di sekolah. Mulai penyusunan program hingga pengelolaan anggaran.

Menurutnya, kepala sekolah menjadi penanggung jawab utama dalam pengawasan dan pengendalian program pendidikan di sekolah. Dia khawatir jika jabatan terulur lama kosong, target peningkatan mutu pendidikan akan terdampak. "Kalau terulur lama kosong, ritme kerja sekolah bisa terganggu," kata Dhamroni. (ful/hen)

SEKOLAH-SEKOLAH YANG MASIH DIPIMPIN PLT
172 SD yang dipimpin Plt kepala sekolah
15 SMP belum punya kepegk definitif
126 lembaga yang segera dilunasi
61 kepegk SD masih dicari



Pemetaan Lahan Flyover Gedangan Dikebut

■ Pemkab Target Tuntas Enam Bulan

GEDANGAN-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memprioritaskan proses pemetaan dan pendataan seluruh objek tanah yang terdampak pembangunan Flyover Gedangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat proses pembebasan lahan sebelum proyek strategis itu memasuki tahap konstruksi.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, proses pendataan telah berjalan dan melibatkan pemerintah kecamatan serta pemerintah desa di wilayah ter-



PADAT: Kemacetan rutin terjadi di Jalan Raya Gedangan.

dampak. Pendataan dilakukan secara menyeluruh guna memastikan tidak

ada persoalan yang dapat menghambat pelaksanaan proyek di kemudian hari.

“Kita sudah mulai melakukan pemetaan objek tanah. Saya juga telah memerintahkan camat dan pemerintah desa untuk melakukan pemetaan wilayah secara detail,” ujar Subandi.

Menurutnya, pemetaan tidak hanya menyangkut status kepemilikan tanah, tetapi juga berbagai potensi persoalan yang kemungkinan muncul saat proses pembebasan lahan berlangsung. Mulai dari keberadaan ahli waris, tanah yang masih bersengketa, hingga aset milik instansi maupun perusahaan negara.

“Termasuk ahli waris, tanah yang masih konflik,

tanah kas instansi, hingga tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI), semuanya sudah mulai kita peta-kan,” katanya.

Subandi optimistis seluruh tahapan pemetaan serta penyelesaian persoalan administrasi lahan dapat diselesaikan dalam enam bulan ke depan. Dengan demikian, proses pembebasan lahan dapat berjalan lebih lancar dan pembangunan flyover segera direalisasikan.

“Kami targetkan dalam enam bulan persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan. Inshaallah seluruh proses sudah berjalan dengan baik,” tegasnya.

● Ke Halaman 10



Pemetaan Lahan Flyover...

Flyover Gedangan menjadi salah satu proyek infrastruktur strategis yang di-

harapkan mampu mengurai kemacetan di jalur utama Surabaya-Sidoarjo. Selama ini kawasan tersebut dikenal sebagai salah satu titik padat kendaraan, teru-

tama pada jam-jam sibuk.

Selain memperlancar arus lalu lintas, keberadaan flyover juga diproyeksikan mendukung mobilitas masyarakat serta

meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah Gedangan dan sekitarnya. Saat ini Pemkab Sidoarjo terus berkoordinasi dengan seluruh pihak ter-

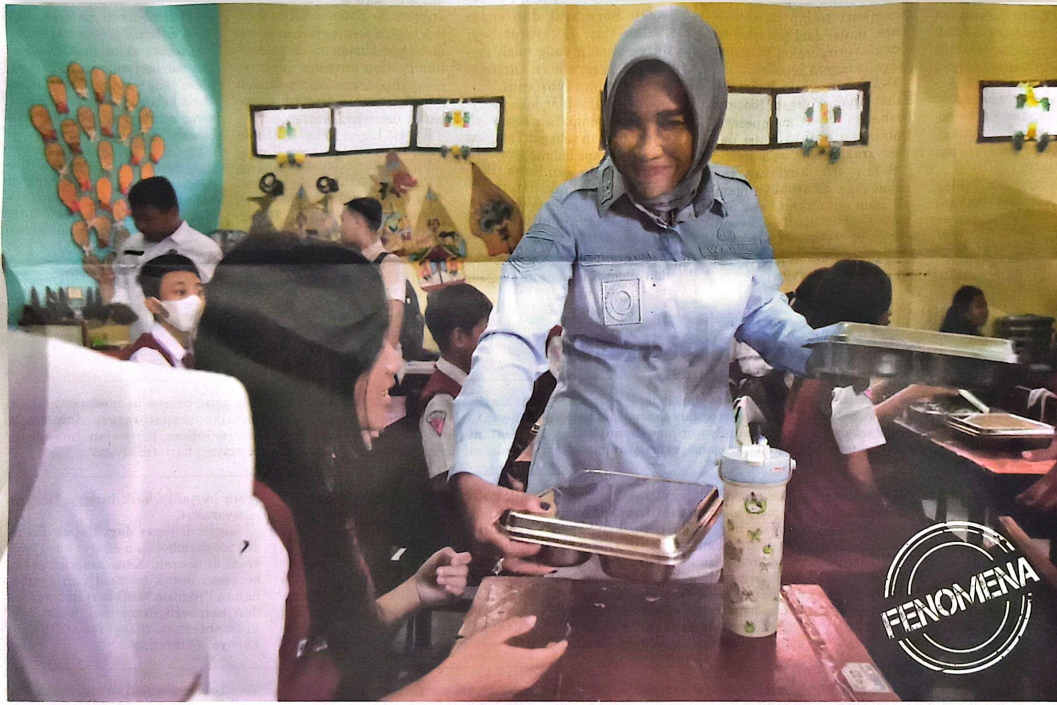
kait agar proses pembebasan lahan berjalan sesuai target dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. (dik/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



EVALUASI: Ketua DPC Gerindra Sidoarjo yang juga Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana saat membagi MBG ke siswa di sekolah.

Gerindra Dukung Perombakan Pimpinan BGN, Dinilai Perkuat Program MBG

Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto merombak jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat dukungan dari daerah. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal, efektif, dan tepat sasaran.

Diky Putra Sansiri, Wartawan Radar Sidoarjo

KETUA Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, Mimik Idayana, menyambut positif kebijakan pergantian Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya. Menurutnya, perombakan tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh untuk memperkuat tata kelola program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. "Kami di Sidoarjo sangat mengapresiasi ketegasan Bapak Presiden Prabowo. Perombakan pimpinan BGN ini bukan sekadar penyegaran organisasi, tetapi menunjukkan bahwa

● Ke Halaman 10



Gerindra Dukung Perombakan...

pemerintah serius melakukan pembenahan agar program MBG dapat berjalan maksimal," ujar Mimik.

Wakil Bupati Sidoarjo itu menjelaskan, program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, khususnya usia

sekolah. Karena itu, lembaga yang menjalankan program tersebut harus memiliki sistem kerja yang kuat, cepat, dan efektif.

Menurutnya, evaluasi hingga tingkat pimpinan merupakan langkah yang wajar apabila diperlukan untuk meningkatkan kinerja maupun menyempurnakan pelaksanaan program di lapangan.

"Ini menjadi pesan bahwa pemerintah terus memantau jalannya program dan siap melakukan perbaikan kapan pun dibutuhkan.

Tujuannya satu, yakni memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan lancar dan pemenuhan gizi anak-anak benar-benar tepat sasaran," tegasnya. Mimik menambahkan, langkah Presiden Prabowo juga menunjukkan kom-

itmen pemerintah untuk tidak memberi ruang bagi berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu keberhasilan Program MBG.

Sebagai partai pengusung Presiden Prabowo, lanjutnya, DPC Gerindra Sidoarjo siap mendukung dan mengawal setiap upaya pembenahan yang dilakukan pemerintah pusat, termasuk memastikan implementasi pro-

gram berjalan baik hingga tingkat masyarakat.

"Langkah tegas dari Bapak Presiden ini memberikan energi baru bagi kami di daerah. Kami siap bergerak bersama untuk memastikan pembenahan Program MBG berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (dik/vga)



Bupati Minta Baznas Sidoarjo Segera Perbaiki Rumah Empat Warga Desa Pabean Sedati

Sidoarjo, Memorandum

Sudah cukup lama Sujiono, Soleh, serta Dayat, dan Rukiani tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH). Keempatnya merupakan warga Desa Pabean, Kecamatan Sedati.

Sujiono dan Soleh tinggal di Dusun Alas Tapis, sedangkan Dayat dan Rukiani tinggal di Dusun Payan. Dua dusun itu masuk Desa Pabean.

Kondisi rumah keempat warga kurang mampu itu cukup memprihatinkan. Terlebih rumah Soleh, Dayat dan rumah Rukiani yang rusak cukup parah.

Bupati Sidoarjo Subandi inspeksi mendadak (sidak) ke rumah empat warga Desa Pabean tersebut, Minggu (31/5). Satu per satu RTLH itu ditinjauanya bersama Baznas Sidoarjo dan Dinas Sosial Sidoarjo.

Hasilnya, ia mendapati keempat rumah tersebut betul-betul butuh perbaikan segera. Mulai dari perbaikan atapnya, lantainya serta dindingnya dan kamar mandinya.

Kondisi rumahnya tadi kita lihat kamar mandinya tidak layak, biar nanti kita benahi, kalau hujan rumah ini banjir karena atapnya bocor, nanti juga ada peningkatan dan lantai akan kita eram, serta ventilasinya juga



Bupati Sidoarjo Subandi sidak rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Pabean, Kecamatan Sedati.



tidak ada, nanti rumah ini kita hadapkan ke Selatan," ujar bupati usai sidak ke rumah Soleh. Bupati berharap pemilik rumah dapat merawat rumahnya setelah perbaikan dilakukan. Penghuni rumah harus dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sekira terdapat barang-barang yang tidak terpakai hendaknya dibuang. Tidak ditumbun di dalam rumah yang akan mengotori rumah itu

sendiri. "Nanti kalau sudah dibangun, ini harus dibersihkan, kamar-kamar tidak boleh ditaruh barang-barang yang kotor," pesan bupati kepada Soleh. Bupati berharap perbaikan keempat RTLH tersebut dapat segera dilakukan. Ia meminta perbaikan dapat dilakukan di bulan Juni ini. Salah satunya perbaikan rumah milik Dayat yang dindingnya mengalami

beberapa keretakan. Ia khawatir jika rumah RTLH seperti ini tidak segera diperbaiki. Pasalnya dapat mengancam pemilik rumah. "Ini menjadi kekhawatiran, tembok-tembok putus semua, saya masuk kebelakang atap sengnya juga kerosok semua, kamar mandi juga begitu kondisinya, nanti kita benahi, lantainya juga kita tinggikan," ujar bupati di rumah Dayat.

Perbaikan yang sama juga diminta Bupati Sidoarjo pada rumah Rukiani. Perbaikan lantai serta kamar mandinya dapat segera dilakukan. Selain itu pembuatan ventilasi udara juga dapat dikerjakan dalam renovasi rumah Rukiani nanti. "Saya minta kepada Baznas, rumah ini dikasih ventilasi agar bu Rukiani tidak terganggu kesehatannya karena bu Rukiani sakit stroke, juga kamar mandinya

kita benahi, juga nanti tak kasih hadiah kursi roda, tapi syaratnya anaknya harus mengajak ibu Rukiani ini jalan-jalan dengan kursi roda," ujar bupati yang disambut syukur oleh Rukiani dan anaknya Towilah. Sementara itu Towilah mengaku bersyukur rumahnya menjadi salah satu penerima manfaat program renovasi rumah dari Baznas Sidoarjo. Keputusan bupati untuk mem-

perbaiki rumahnya menjadi rezeki yang tak pernah dibayangkan. Peralnya keinginan untuk memperbaiki rumah itu sudah ada sejak lama. Namun keinginan itu tidak dapat diwujudkan karena perekonomian keluarganya. Padahal sudah cukup lama rumah yang ditempati ibunya beserta cucu-cucunya itu dalam kondisi rusak. "Alhamdulillah, rezeki," ujarnya. (adv/krt/jok/fer)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

✓ Prabowo Evaluasi Pimpinan BGN

Diapresiasi Gerindra Sidoarjo

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi dan perombakan kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat apresiasi dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal.

Ketua DPC Gerindra Sidoarjo H. Mimik Idayana mengatakan, keputusan tersebut menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk terus melakukan pembenahan demi keberhasilan program prioritas nasional.

“Kami di Sidoarjo sangat mengapresiasi ketegasan Bapak Presiden Prabowo. Perombakan pimpinan BGN ini bukan sekadar penyegaran organisasi, tetapi bentuk nyata bahwa pemerintah serius melakukan pembenahan agar program MBG bisa berjalan maksimal,” ujar Mimik dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Menurut Mimik, program MBG merupakan program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, tata kelola yang baik dan percepatan pelaksanaan menjadi hal yang sangat penting.

Ia menilai, evaluasi hingga level pimpinan merupakan langkah yang wajar apabila diperlukan untuk mempercepat kinerja organisasi dan memperbaiki sistem pelaksanaan program.

“Ini menjadi pesan kuat bahwa pemerintah terus memantau jalannya program dan siap melakukan perbaikan kapan pun diperlukan. Tujuannya agar pelaksanaan di lapangan berjalan lancar dan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

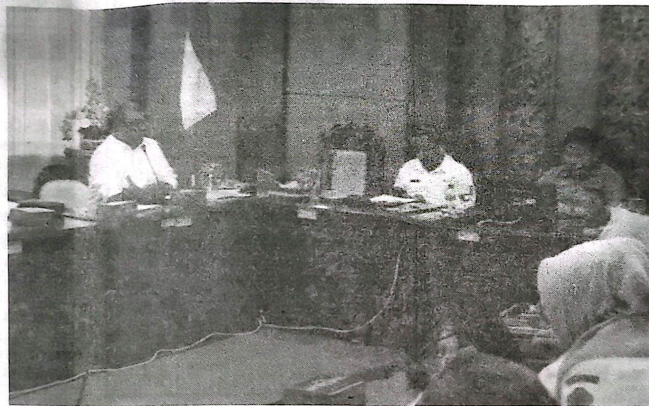
Wakil Bupati Sidoarjo tersebut menambahkan, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan. (md/rus)



Mimik Idayana saat meresmikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sidoarjo

35 Berkas Ganti Rugi Lumpur Lapindo Belum Tuntas

Sidoarjo – HARIAN BANGSA
PT Minarak Lapindo Jaya mengklaim proses pembayaran ganti rugi terhadap warga terdampak lumpur Lapindo yang berada di dalam area peta terdampak kini menyisakan 35 berkas yang belum terselesaikan. Perusahaan menyatakan siap menuntaskan pembayaran tersebut setelah dilakukan verifikasi data.



Bupati Sidoarjo, Subandi, saat rapat bersama perwakilan PT Minarak Lapindo Jaya.

Direktur PT Minarak Lapindo Jaya, Bambang Prasetyo Widodo, mengatakan pihaknya berkomitmen menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada warga yang memiliki hak atas ganti rugi. "Kalau berdasarkan data yang ada pada kami, untuk area peta terdampak saat ini tinggal sekitar 35 berkas yang masih perlu diverifikasi dan diselesaikan. Kami siap datang dan melakukan pembayaran sesuai data yang valid," kata Bambang saat mengikuti rapat pembahasan percepatan penyelesaian hak warga terdampak Lumpur Lapindo, Rabu (3/6/2026).

Menurut Bambang, berbagai tuntutan terkait kekurangan pembayaran yang disampaikan warga merupakan aspirasi yang wajar dan akan menjadi bahan evaluasi bersama. Seluruh berkas yang diajukan warga akan ditelusuri kembali untuk memastikan tidak ada hak masyarakat yang terabaikan.

Belum dibayarnya 35 berkas tersebut karena berbagai masalah. Ada yang belum dibayar karena data tanah sawah diubah menjadi pekarangan dan karena persoalan rebutan hak waris. Ada juga yang tidak diurus karena korban tinggal di Amerika dan ada juga korban

minta ganti rugi dengan nilai tidak masuk akal yaitu Rp 1 triliun.

Dalam rapat tersebut juga terungkap adanya data dari perwakilan warga yang menyebut masih terdapat puluhan pemilik lahan yang belum menerima pembayaran secara tuntas. Bahkan terdapat ratusan berkas pengajuan baru yang perlu ditinjau ulang.

"Data yang masuk jumlahnya sangat banyak dan beragam. Kemarin juga ada sekitar 200 berkas yang dibawa untuk ditelaah kembali. Semua akan kami cek bersama agar jelas mana yang sudah selesai dan mana yang masih menjadi kewajiban," ujarnya.

Bambang menegaskan kewajiban pembayaran ganti rugi tersebut merupakan tanggung jawab PT Minarak Lapindo Jaya dan bukan utang kepada negara. Karena itu, pihaknya siap berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk mempercepat penyelesaian.

"Kami tidak menghindari dari tanggung jawab. Ini kewajiban perusahaan kepada warga yang berhak. Karena itu kami siap hadir dan menyelesaikannya," tegasnya. (md/rus)

187 SD-SMP Negeri Masih Dipimpin Plt Kepala Sekolah

Pemkab Siapkan Pengganti

SIDOARJO - Tak semua sekolah negeri di Kota Delta dipimpin kepala sekolah (kepsek) definitif. Ada 172 SDN dan 15 SMPN yang masih dipimpin pelaksana tugas (plt) kepsek. Pemkab berencana melakukan perekrutan untuk memenuhi kebutuhan kepala sekolah. Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud)

Sidoarjo Netti Lastiningsih membenarkan adanya sekolah yang belum memiliki kepsek definitif. Meski begitu, pemkab sudah menyiapkan calon kepala sekolah yang akan segera dilantik. Ada 111 calon kepala sekolah SDN dan 15 calon kepala sekolah SMPN yang sudah disiapkan. "Kebutuhan SMP sudah terpenuhi. Untuk SD masih kurang 61 orang," kata Netti. Dia menambahkan, pemkab berencana membuka kembali perekrutan kepala

SEKOLAH-SEKOLAH YANG MASIH DIPIMPIN PLT



sekolah tahun ini. Hal tersebut agar kekosongan jabatan di tingkat SDN tidak berlangsung terlalu lama. "Nanti ada perekrutan lagi setelah proses yang saat ini sudah selesai, sampai di sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah (KSPS)," ujarnya. Dia menegaskan posisi plt tidak bisa digunakan dalam



Kebutuhan SMP sudah terpenuhi. Untuk SD masih kurang 61 orang." Netti Lastiningsih Plt Kepala Dinas Dikbud Sidoarjo

Penanggung Jawab Pengawasan

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori meminta Dinas Dikbud Sidoarjo segera menyiapkan perekrutan. Kekosongan kepala sekolah bisa berdampak

pada lambatnya pengambilan kebijakan di sekolah. Mulai penyusunan program hingga pengelolaan anggaran. Menurutnya, kepala sekolah menjadi penanggung jawab utama dalam pengawasan dan pengendalian program pendidikan di sekolah. Dia khawatir jika jabatan terlalu lama kosong, target peningkatan mutu pendidikan ikut terdampak. "Kalau terlalu lama kosong, ritme kerja sekolah bisa terganggu," kata Dhamroni. (ful/hen)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



ANGGER BONDAN/JAWA POS



ALFIAN RIZAL/JAWA POS

BELUM TUNTAS: Pipa pembuangan Lumpur Sidoarjo terhubung langsung dengan Kali Porong. Foto kanan, korban Lumpur Sidoarjo Astuti (dua dari kiri) didampingi Ketua FKLS Basuni (dua dari kanan) berkunjung ke kantor redaksi Jawa Pos, Graha Pena Surabaya, kemarin (3/6).

Nilai Tanah Rp 40 Miliar Ditawar Rp 7 Miliar

Korban Lumpur Minta Ganti Rugi Segera Dilunasi

SIDOARJO - Sudah 20 tahun bencana Lumpur Sidoarjo melanda Desa Ketapang dan sekitarnya. Namun hingga saat ini, masih ada ganti rugi yang belum dilunasi. Para korban lumpur meminta sisa ganti rugi yang belum cair segera dibayarkan.

Salah satu korban lumpur, Astuti mengatakan bahwa keluarganya memiliki tanah seluas 40 hektar berbentuk lahan perumahan di kawasan Tanggulangin. Berdasarkan perhitungan, nilai tanah yang sudah tenggelam itu mencapai Rp 40 miliar.

"Sama Minarak (PT Minarak Lapindo Jaya, Red) ditawarkan Rp 7 miliar. Tentu saja, saya menolak," kata Astuti saat berkunjung ke Kantor Redaksi

Koran Jawa Pos kemarin (3/6). Pengusaha berusia 70 tahun itu menegaskan, dirinya memiliki bukti kepemilikan lahan yang sah dan peta bencana lumpur. "Nilai tanah dihitung tahun 2007. Seharusnya nilainya lebih tinggi tahun ini," tambah Astuti.

Ketua Forum Korban Lumpur Sidoarjo (FKLS) Basuni menjelaskan, ada 32 pengusaha yang ganti ruginya belum lunas. Seluruhnya me-

iliki bukti kepemilikan tanah. Basuni berharap ada bantuan dari pemerintah untuk proses ganti rugi.

Proses Validasi

Secara terpisah, PT Minarak Lapindo Jaya mengklaim proses pembayaran ganti rugi korban Lumpur Sidoarjo menyisakan 35 berkas dari 21 pemilik lahan yang belum terselesaikan.

Direktur PT Minarak La-

pindo Jaya Bambang Prasetyo Widodo mengatakan, seluruh sisa berkas tersebut masih dalam proses validasi data sebelum pembayaran. "Berkas masih perlu diverifikasi," katanya.

Selain pemilik lahan, Bambang menyebut pembayaran terhadap sektor pengusaha terdampak telah berjalan sekitar 30 persen. Berdasarkan data PPLS, terdapat 30 perusahaan yang terdampak. (ful/hen)

Jawa Pos

Sidoarjo

Jawa Pos • METROPOLIS | KAMIS 4 JUNI TAHUN 2026 | HALAMAN 18



TANDING: Atlet dari klub Babo Stable Khanza Anindi Syafira menunggangi kuda bernama Pamela Blambangan di Yussar Stable Kalidawir, Tanggulangin, kemarin (3/6).

Asah Keterampilan Atlet Muda Melalui Lomba Berkuda

SIDOARJO - Sebanyak 50 atlet dari berbagai daerah unjuk ketangkasan menunggangi kuda di Yussar Stable and Riding Club, Desa Kalidawir, Tanggulangin, kemarin (3/6). Mereka berasal dari berbagai daerah mulai Kediri hingga Banyuwangi.

Lomba berkuda digelar Pemkab Sidoarjo. Sebanyak 80 kuda dilibatkan dalam kompetisi yang digelar sejak Selasa (2/6). Sebagian besar peserta merupakan atlet berusia muda.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

(Disporapar) Sidoarjo Yudhi Irianto mengatakan, antusiasme peserta dalam event tersebut cukup tinggi. Kegiatan itu menjadi bagian pengembangan olahraga berkuda di Sidoarjo. "80 persen peserta berasal dari Kota Delta. Ini menunjukkan kalau olahraga berkuda mulai diminati," katanya.

Selain menjadi ajang pertandingan, event tersebut dimanfaatkan untuk menambah pengalaman bertanding para atlet muda. Menurut Yudhi, Pemkab akan terus mendukung kegiatan olahraga yang mam-

pu menghadirkan prestasi sekaligus mendorong sport tourism Kota Delta.

Ketua Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Sidoarjo Zuhul Yussar menjelaskan, event dibuat gratis agar bisa diikuti lebih banyak peserta. Mulai biaya pendaftaran, kandang hingga fasilitas pertandingan seluruhnya ditanggung panitia. "Kalau ikut event berkuda biasanya biayanya cukup besar. Di sini kami gratiskan supaya atlet-atlet muda bisa punya kesempatan ikut lomba," ujarnya. (ful/hen)

Jawa Pos